

Artikel Pembicara

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid -19; Refleksi Sosiologis¹

Khoirul Rosyadi²

Universitas Trunojoyo Madura

*Email korespondensi: khorosid@yahoo.com

Abstract

This research is a qualitative research with a literature study approach on the problem of poverty and social inequality that occurred in East Java during and after the covid 19 pandemic. The results of the research show that poverty and social inequality that occur in East Java, especially in Madura and other underdeveloped areas, because of cultural and structural problems. Therefore, to get out of the poverty trap, cultural and structural efforts are needed. With this two-approach model, in the future East Java is expected to be able to get out of the problem of poverty.

Keywords; poverty, social inequality, East Java, Covid 19, Madura.

Abstrak

Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan studi pustaka tentang masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di Jawa Timur selama dan pasca pandemi covid 19. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di daerah Madura dan daerah terbelakang lainnya, karena adanya masalah kultural dan struktural. Karenanya untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan dibutuhkan upaya kultural sekaligus struktural. Dengan model dua pendekatan ini, kedepan Jawa Timur diharapkan bisa keluar dari masalah kemiskinan.

Kata kunci; Kemiskinan, kesenjangan sosial, Jawa Timur, Covid 19, Madura.

Pandemi Covid 19, telah memukul hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat; social, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, hingga cara beragama. Pandemi pun membawa dampak perekonomian dan mobilitas social warga dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ekonomi ambruk; kemiskinan, pengangguran, kesenjangan social pun semakin terang dan nyata.

¹ Disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Dinamika dan Strategi Penanggulan Kemiskinan di Jawa Timur Selama dan Pasca Pandemi -19” yang diselenggarakan oleh SMERU dan UTM pada tanggal 25 Agustus 2021.

² Penulis adalah pendidik di Program Studi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo

Jawa Timur -- yang sebelum pandemic tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki problem kemiskinan dan kesenjangan – pada masa pandemic mengalami kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Selama diterjang badai pandemi COVID-19, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2021 berjumlah 4.572.730 jiwa atau sebesar 11,40%.

Pada wilayah perkotaan persentase penduduk miskin meningkat 0,01%. Dari 8,37% pada bulan September 2020 menjadi 8,38% pada Maret 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 sebesar 15,16%, turun menjadi 15,05% pada Maret 2021.

Selama periode September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 20.090 jiwa. Dari 1.820.130 jiwa pada September 2020 menjadi 1.840.210 jiwa pada Maret 2021. Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 33.320 jiwa. Dari 2.765.840 jiwa pada September 2020 menjadi 2.732.510 jiwa pada Maret 2021.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan selama periode September 2020-Maret 2021. Antara lain, situasi pandemi COVID-19 di Jatim masih terjadi. Selama bulan Maret 2021, di Jatim tambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 10.099 kasus, sedikit lebih banyak dibandingkan tambahan kasus terkonfirmasi positif selama September 2020 yang sebanyak 10.012 kasus (Dadang Hardiwan; 2021).

Memang pandemic membuat Kita berada dalam situasi sulit dan dilematis; menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling bertolak belakang. Memfokuskan pada sektor kesehatan agar tidak terjadi perluasan pandemi covid-19 dengan mengharuskan orang berada di rumah, tidak bergerombol, menghindari kontak fisik berakibat fatalnya kondisi ekonomi dan mobilitas sosial.

Namun di tengah situasi pandemic covid 19 yang masih tak terkendali, Gubernur Jawa Timur masih memberikan dan menjaga optimisme masyarakat; pada Triwulan I Tahu 2021 pertumbuhan dan kinerja perekonomian Jawa Timur diklaim telah mulai membaik dengan nilai terkontraksi sebesar 0,44 persen dan berada di atas capaian Nasional yang terkontraksi sebesar 0,74 persen. Jawa Timur

merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta, yakni sebesar 24,80 persen di tahun 2020 dan 24,62 persen pada Triwulan I tahun 2021.

Selain itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5,84 atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebesar 2,02 poin. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Jawa Timur, jumlah penganggur mulai berkurang dan pada bulan Februari tahun 2021 Tingkat pengangguran Terbuka Jawa Timur menjadi sebesar 5,17 persen mengalami penurunan sebesar 0,67 poin dibanding Agustus 2020 serta jumlah penganggur berkurang sebanyak 154,08 ribu orang (Khofifah; 2021).

Namun ditengah kinerja perekonomian yang membaik, Gubernur Jawa Timur mengakui, bahwa masih ada ketimpangan pendapatan antar penduduk. Di Jawa Timur, pada Maret 2021 realisasi Indeks Gini Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 0,374 yang berarti bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antar penduduk, tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan sedang.

Selain terjadi ketimpangan pendapatan, di Jawa Timur juga masih terjadi ketimpangan antar wilayah. Dalam Nota Reperda tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa capaian indeks theil Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,3077 yang berarti bahwa ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur menjadi semakin kecil. Meski mengalami penurunan, nyatanya ketimpangan tersebut masih nyata dan ada. Pertanyaanya; mengapa masih terjadi kemiskinan dan kesenjangan social di Jawa Timur?

Secara sosiologis, kemiskinan memiliki beberapa dimensi dan penyebabnya, diantaranya; 1) Kemiskinan absolut; pendapat seseorang berada di bawah pada garis kemiskinan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang mendasar; 2) Kemiskinan relative; kemiskinan yang terjadi akibat kebijakan yang belum menjangkau seluruh masyarakat karena ada ketimpangan; 3) Kemiskinan kultural; kemiskinan yang terjadi karena lebih banyak disebabkan mentalitas masyarakat seperti boros, malas, tidak kreatif meski ada bantuan; dan 4) Kemiskinan

stuktural; kemiskinan akibat rendahnya akses yang dimiliki oleh masyarakat karena system sosial, budaya yang tidak adil.

Oscar Lewis (dalam Parsudi Suparlan: 1995), meyakini bahwa kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan lahir karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Sementara kebudayaan kemiskinan dan kesenjangan lahir dalam masyarakat yang memiliki karekter; 1) Sistem perekonomian terlalu berorientasi pada keuntungan. 2) Tingginya tingkat atau angka pengangguran dan setengah dari pengangguran tersebut adalah tenaga tak terampil. 3) Rendahnya upah atau gaji yang diperoleh pekerja. 4) Tidak berhasilnya orang yang berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politik secara sukarela. 5) Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral. 6) Kuatnya nilai-nilai pada kelas berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal atau kesempatan untuk terus meningkat dalam status sosial.

Meski penjelasan Lewis bukanlah jawaban terakhir dari sebuah perdebatan panjang tentang kemiskinan, Lewis menyadarkan kita bahwa kemiskinan sesungguhnya dan kesenjangan lahir dari persoalan kultural dan struktural yang ada dalam masyarakat. Karenanya mengurai persoalan kemiskinan tidak hanya berhenti pada satu variabel saja seperti kebudayaan misalnya, melainkan ada beberapa dimensi lain yang melatarbelakangi kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat seperti sejarah kolonialisme, struktur sosial (sistem kasta dan patronase), keadilan atau pemberian kesempatan yang sama, kebijakan negara, dan sebagainya. Masuknya kapitalisme dan globalisasi di negara-negara berkembang menambah satu alasan terjadinya perubahan yang sangat besar dan radikal di segala aspek kehidupan yang dapat melahirkan kesenjangan sosial yang begitu lebar.

Dalam konteks itulah, maka sebenarnya kemiskinan dan kesenjangan social terjadi di Jawa Timur. Tentu pandemic covid 19 adalah factor yang memperparah situasi kemiskinan di Jawa Timur. Namun ada persoalan persolan structural yang harus diakui yang menjadikan kenapa Jawa Timur tidak bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan kesenjangan social. Selain juga di beberapa daerah juga harus diakui factor budaya juga menjadi problem yang tidak bisa diabaikan.

Karenanya, untuk bisa keluar dari kemiskinan dan kesenjangan social di masa dan setelah pandemic covid 19, harus ada kebaranian structural sekaligus kultural. Amartya Sen (2013), pernah menawarkan jalan dialog kebudayaan. Guru Besar Filsafat dan Ekonomi di Harvard University tersebut percaya bahwa dialog kebudayaan mampu memecahkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat (dunia), baik di bidang ekonomi (kemiskinan), politik, konflik, maupun bidang-bidang strategis lain.

Selain itu, menurut peraih Hadiah Nobel Bidang Ilmu Ekonomi tahun 1998 tersebut menegaskan bahwa, kebudayaan juga bisa menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebuah bangsa atau masyarakat. Karenanya mengesampingkan budaya dan kebudayaan dalam pembangunan (ekonomi) sesungguhnya menggerus potensi kesejahteraan yang dijanjikan ekonomi itu sendiri.

Pemahaman tersebut membawa kita pada satu tesis bahwa kebudayaan sebenarnya merupakan pengendapan nilai, pikir, agama, pandangan, sikap, teknologi, mata kehidupan, rasa, batin dan jiwa masyarakat yang di dalamnya ada beragam potensi (ekonomi) yang mampu menggerakkan peradaban manusia.

Karenanya, berbicara tentang kebudayaan dalam pusran ekonomi, meminjam penjelasan Donny Gahril Adian, kebudayaan sesungguhnya sebatas monolog yang bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan, melainkan dilakoni. Sebab kebudayaan sesungguhnya orkestra kolektif menuju “tanah perjanjian” bernama peradaban.

Dengan demikian, kebudayaan bukanlah ruang kosong yang hanya menghadirkan komtemplasi dan perbincangan pikiran. Kebudayaan adalah gerak nilai yang aktualisasinya membutuhkan mata angin. Kebudayaan adalah penggerak pembangunan (ekonomi), motor transformatif dan jalan keluar bagi kebuntuan peradaban; kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan (Donny Gahril Adian; 2013).

Jika kebudayaan adalah sebuah pilihan untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, maka yang kita butuhkan sekarang adalah strategi kebudayaan yang tepat bagi masyarakat Jawa Timur dan pemerintah untuk bisa keluar dari problem kemiskinan dan kesenjangan. Kebaranian untuk membuka diri tanpa harus

menghilangkan kecerdasan lokal yang ada dalam masyarakat Jawa Timur merupakan strategi kebudayaan yang tepat untuk saat ini.

Tentu saja pendekatan kebudayaan semata mata tidak lah cukup. Dibutuhkan niat baik (*political will*) atau pendekatan struktural dari pemerintah Jawa Timur untuk bisa keluar dari kemiskinan. Niat baik pemerintah ini bukan saja ditunjukkan dalam bentuk kebijakan yang memberi ruang dan berpihak kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat marjinal, namun juga keberanian pemerintah daerah untuk bisa transparan, tidak koruptif, manipulatif dan nepotisme. Hanya dengan pendekatan itu, kemiskinan dan kesenjangan di era pandemic covid 19 dan setelahnya, bisa dihapus dari bumi Jawa Timur. Paling tidak kita bisa meminimalisirnya. Semoga.